

MACROECONOMIC COMPARISON IN THE ASEAN REGION DURING 2015-2018

Allenly Aldo Likuayang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Klabat
allenly.likuayang@gmail.com

Ernest Cornelius Matindas

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Klabat
ematindas@unklab.ac.id

Abstract

The increasingly competitive global economy makes every country work hard to improve its economic performance. This study aims to compare the macroeconomic conditions of ASEAN countries, namely Indonesia, Brunei Darussalam, the Philippines, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, and Vietnam during 2015 - 2018, or under the President of the Republic of Indonesia, Ir. H. Joko Widodo. The increasingly competitive global economy makes every country work hard to improve economic performance. This study aims to determine the comparison of the macroeconomic conditions of ASEAN countries, namely Indonesia, Brunei Darussalam, the Philippines, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, and Vietnam during 2015 - 2018, namely during the reign of the President of the Republic of Indonesia, Ir. H. Joko Widodo. The macroeconomic conditions of each ASEAN country are described in their economic growth, income per capita, inflation rate, and unemployment rate. One Way ANOVA was used to compare each country's macroeconomic condition and to test whether there are significant differences between the countries. Tukey test was used as a post hoc test technique to explain the pattern of the differences. The results of the One Way ANOVA test shows that economic growth, income per capita, inflation rate, and the unemployment rate of Indonesia and 9 ASEAN countries have a significance value of α less than 0.05, so it can be concluded that economic growth, per capita income, inflation rate and unemployment rate in Indonesia and 9 ASEAN countries have significant differences.

Keywords: ASEAN, economic growth, income per capita, inflation rate, macroeconomic, unemployment rate

KOMPARASI MAKRO EKONOMI NEGARA-NEGARA ASEAN TAHUN 2015-2018

Abstrak

Ekonomi global yang semakin kompetitif membuat setiap negara bekerja keras untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kondisi makro ekonomi negara-negara ASEAN yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam selama tahun 2015 - 2018 yaitu di masa periode pemerintahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. Kondisi makro ekonomi setiap negara ASEAN digambarkan melalui beberapa indikator yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat inflasi, dan tingkat

pengangguran. Perbandingan makro ekonomi pada negara ASEAN dilakukan melalui analisis komparasi uji beda *One Way ANOVA* untuk menjawab apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara indikator makro ekonomi Indonesia dan 9 negara ASEAN, dan teknik uji lanjut (*post hoc test*) menggunakan uji *Tukey Honestly Significant Difference* untuk menjelaskan pola perbedaan dalam hasil uji *One Way ANOVA*. Hasil uji beda *One Way ANOVA* menunjukkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia dan 9 negara ASEAN masing-masing memiliki nilai signifikansi α kurang dari 0.05 sehingga disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia dan 9 negara ASEAN memiliki perbedaan yang signifikan.

Kata kunci: ASEAN, makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat inflasi, tingkat pengangguran

Pendahuluan

Era globalisasi saat ini membuat dinamika perekonomian dunia semakin kompetitif. Hal itu membuat setiap negara berlomba-lomba dalam mengoptimalkan kinerja ekonomi negara demi mencapai perekonomian nasional yang maju dan berdaya saing dalam skala regional maupun internasional.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang maju dan berdaya saing itu tidak lepas dari peranan pemerintah. Di Indonesia pemerintah memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi, yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi (Ma'ruf & Wihastuti, 2008). Perkembangan perekonomian Indonesia sendiri berubah-ubah seiring dengan pergantian era pemerintahan di Indonesia.

Pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2014, telah melahirkan pemimpin baru bagi Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 2014, Presiden RI terpilih— Ir. H. Joko Widodo secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019. Dengan dilantiknya Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden baru, rakyat Indonesia tentu mengharapkan realisasi janji-janji kampanye semasa pencalonan Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional, Presiden Joko Widodo melandaskan upaya pembangunan ekonomi pada rancangan program pembangunan yang dinamakan “Nawacita”. Nawacita merupakan sembilan agenda prioritas pembangunan terkait kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian kebudayaan Indonesia yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo semasa pencalonan diri sebagai Presiden Indonesia untuk diterapkan dalam pembangunan di Indonesia (Wedhaswary, 2014). Nawacita kemudian diterjemahkan secara resmi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang merupakan visi, misi dan program-program kerja selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Kementerian PPN RI, 2015).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, tertulis salah satu agenda pembangunan yang terkandung dalam Nawacita, yaitu: “*Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya*”. Agenda tersebut merupakan butir keenam dalam Nawacita yang menyatakan dengan tegas pentingnya meningkatkan “produktivitas” dan “daya saing” dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam perekonomian global, daya saing menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dalam dunia internasional dan memiliki kesetaraan dengan

negara-negara lain (Kantor Staf Presiden RI, 2015).

Di tengah berjalannya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan akibat gejolak ekonomi global. Selain di Indonesia, gejolak ekonomi global juga menekan perekonomian berbagai negara di belahan dunia, termasuk di wilayah Asia dan regional (Badan Pusat Statistik, 2016).

Dalam kawasan regional, tekanan perekonomian global berdampak buruk terhadap perekonomian sejumlah negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Perang dagang Amerika Serikat dan China mengakibatkan perekonomian negara-negara ASEAN menjadi lesu, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand, yang mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi dan penurunan kinerja ekspor (Deutsche Welle, 2019). Meskipun demikian, negara-negara ASEAN secara umum mencapai angka pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi dunia, negara maju, dan negara berkembang. Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN mencatatkan tren positif dari angka 4,6 persen pada 2014 menjadi 5,1 persen pada 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019).

Di Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani (2019) bahwa kondisi perekonomian global mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia di berbagai sektor, sehingga berdampak pada capaian pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Makkl, 2019). Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira (2019), bahwa evaluasi yang dilakukan pada sasaran RPJMN 2015-2019 masih banyak yang meleset. Tercatat hingga tahun keempat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tingkat pertumbuhan ekonomi belum pernah mencapai target yang ditetapkan. Hampir sebagian besar target ekonomi tidak tercapai, kecuali inflasi yang relatif lebih terkendali dan tingkat pengangguran yang semakin menurun (Daud, 2019). Meskipun target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, realisasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai tetap menunjukkan tren positif namun cenderung stagnan. Menurut Badan Pusat Statistik (2019), kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan akan menghantarkan Indonesia terjebak dalam pendapatan kelas menengah (*middle income trap*), padahal untuk keluar dari "*middle income trap*" dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen.

Seiring dengan melambatnya perekonomian makro, Indonesia mengalami penurunan peringkat daya saing. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution (2019), bahwa turunnya peringkat daya saing Indonesia diakibatkan oleh karena upaya perbaikan kondisi perekonomian makro Indonesia yang belum berjalan secara optimal (Yuniar, 2019). Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) dalam *Global Competitiveness Report (GCI) 2019*, menunjukkan bahwa daya saing Indonesia turun lima peringkat dari posisi 45 ke 50 dari 141 negara (Sembiring, 2019). Turunnya daya saing tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat keempat di antara negara-negara ASEAN, sekaligus membuat Indonesia semakin tertinggal dari beberapa negara ASEAN, yakni Singapura, Thailand, dan Malaysia, namun unggul dari Filipina (Yuniar, 2019).

Di tengah melambatnya laju pertumbuhan perekonomian makro, Indonesia juga mengalami relokasi investasi asing yang beralih ke negara-negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara ASEAN lainnya. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai kalah dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN lain yang sangat impresif dibanding Indonesia (Citradi, 2019). Hengkangnya investasi asing dari dalam negeri mengindikasikan lemahnya daya saing Indonesia, padahal investasi merupakan salah satu kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional agar dapat maju dan bersaing dengan negara-negara lain, khususnya dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

Meskipun diakui bahwa dinamika perekonomian global turut berpengaruh juga pada negara-negara lain di kawasan ASEAN, kondisi perekonomian Indonesia yang ada saat ini turut

berkontribusi pada penilaian publik atas capaian kinerja ekonomi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Realisasi janji-janji kampanye dan sasaran RPJMN 2015-2019 dalam bidang ekonomi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo menuai banyak pro dan kontra. Alasannya beberapa upaya pembangunan ekonomi yang tidak berjalan sesuai harapan mengakibatkan perekonomian Indonesia dinilai tertinggal secara kinerja dan menurun dari segi daya saing dibanding negara-negara lain, terutama dari negara-negara di kawasan ASEAN.

Terkait dengan beragamnya penilaian publik atas realisasi janji-janji kampanye pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya terkait salah satu agenda pembangunan, yakni mewujudkan “*bangsa Indonesia yang maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya*”, maka peneliti tertarik untuk mengkaji gambaran menyeluruh kinerja makro ekonomi Indonesia melalui analisis komparasi dengan sembilan negara ASEAN, meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam sepanjang tahun 2015-2018. Untuk membandingkan perekonomian makro tersebut, maka peneliti menggunakan indikator-indikator makro ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita (PDB per kapita), tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Alasan peneliti menggunakan makro ekonomi sembilan negara ASEAN sebagai pembanding, karena sembilan negara tersebut termasuk dalam satu kawasan regional dan tergabung dalam organisasi ASEAN bersama Indonesia. Alasan peneliti menggunakan keempat indikator makro ekonomi di atas, karena indikator-indikator tersebut merupakan indikator-indikator utama yang digunakan oleh ekonom, instansi pemerintah, dan organisasi internasional dalam mengamati baik buruknya kinerja perekonomian makro suatu negara.

Makro Ekonomi

Makro ekonomi adalah studi tentang fenomena perekonomian secara menyeluruh (Mankiw, 2014). Makro ekonomi mempelajari fenomena yang terjadi dalam suatu perekonomian, termasuk tingkat pertumbuhan output ekonomi total suatu negara, atau kenaikan persentase harga-harga secara umum, atau berapa banyak dari angkatan kerja yang ingin mencari kerja tetapi tidak bisa menemukan pekerjaan (Acemoglu et al, 2015). Makro ekonomi menelaah konsep-konsep yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, di mana mekanisme perekonomian negara banyak dipengaruhi oleh masyarakat, perusahaan, dan perilaku pasar yang selalu terfokus pada insentif (laba) dalam mengambil keputusan (Kurniawan & Budhi, 2015).

Makro ekonomi membahas suatu perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau *agregat* dan mengabaikan unit-unit individu. Maksud digunakan istilah *agregat* yaitu untuk menonjolkan bahwa yang menjadi pusat perhatian dari ekonomi makro adalah variabel-variabel ekonomi secara totalitas, seperti pendapatan nasional, produksi nasional, tabungan, investasi, pengangguran, inflasi dan lain sebagainya (Pristyadi & Sukaris, 2019). Dijelaskan juga oleh Gilarso (2004), bahwa ekonomi makro mempelajari kehidupan ekonomi nasional sebagai suatu keseluruhan atau tingkat nasional dengan membahas berbagai persoalan menyangkut bangsa, termasuk produk dan pendapatan nasional, pembelanjaan masyarakat, jumlah total investasi, tingkat harga, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran, jumlah uang beredar, perkembangan kredit bank dan laju inflasi, kurs dollar, dan lain sebagainya.

Perubahan pada variabel makro ekonomi akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian suatu negara, termasuk adanya perubahan makro ekonomi di Indonesia akan mempengaruhi perekonomian nasional termasuk seluruh industri yang ada, seperti terjadi inflasi yang tinggi dan melemahnya rupiah akan mengakibatkan penurunan daya beli uang, mengurangi tingkat pendapatan riil, goncangan terhadap industri, dan menurunkan jumlah produksi akibat harga-harga bahan baku yang terus naik dan berakibat pada penurunan tingkat laba (Astuti et al, 2016). Dengan mempelajari konsep dan hubungan di antara variabel-variabel

ekonomi, maka setiap pelaku ekonomi dapat memperoleh kemampuan lebih dalam memecahkan berbagai persoalan perekonomian yang dihadapi oleh suatu negara (Reksoprayitno, 2017).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan ekonomi. Indikator ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya (Pristyadi & Sukaris, 2019). Menurut Sukirno (2016), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional riil (Murni, 2019). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Sutawijaya & Zulfahmi, 2010). Selain pengertian tersebut, pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai proses kenaikan output total dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari jumlah pertumbuhan penduduk, atau apakah diikuti oleh perubahan struktur perekonomian atau tidak (Sutawijaya & Zulfahmi, 2010).

Dari beberapa pengertian di atas, seperti yang dikatakan oleh Falianty (2019) bahwa definisi pertumbuhan ekonomi mencakup aspek-aspek berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi sebagai proses, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat saja, melainkan gambaran perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu yang bersifat dinamis.
- b) Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, berarti aspek ini memperhatikan dua hal, yaitu output total (PDB) dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk.
- c) Pertumbuhan ekonomi berlangsung dalam jangka panjang, berarti bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu tujuan utama kebijakan makro ekonomi. Terjadinya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam masyarakat (Kuncoro, 2015). Pentingnya pertumbuhan ekonomi terletak pada sumbangannya terhadap kemakmuran masyarakat secara umum (Falianty, 2019). Adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan penambahan pendapatan per kapita, dan hal tersebut memungkinkan terjadinya pembangunan ekonomi di berbagai bidang (Susanto & Rachmawati, 2013). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan ekonomi berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2015).

Dari uraian di atas, Murni (2019) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah syarat perlu (*necessary condition*) tetapi bukan syarat yang cukup (*sufficient condition*) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan sebagai *necessary condition* artinya seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk maka diperlukan pertumbuhan ekonomi (pendapatan) yang besarnya lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan *sufficient condition*, artinya pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan distribusi pendapatan yang merata (*equity*), sehingga meningkatnya pendapatan suatu negara dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di suatu negara.

Produk Domestik Bruto Per Kapita (PDB Per Kapita)

Pendapatan per kapita merupakan indikator penting dalam makro ekonomi yang dipandang sebagai bagian dari kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Murni, 2019). Menurut Kuncoro (2015), pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduknya. Pendapatan per kapita merefleksikan produk domestik bruto per kapita (PDB per kapita), karena pendapatan nasional umumnya diukur menggunakan PDB, sehingga penghitungan pendapatan per kapita artinya menghitung PDB per kapita (Acemoglu et al, 2015).

Menurut Masniadi (2012), PDB per kapita adalah saham anggota individu dari populasi terhadap total produk domestik bruto tahunan. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa PDB per kapita mengukur pendapatan per individu sebagai ukuran yang digunakan untuk menggambarkan standar hidup (*standard of living*), di mana negara yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi umumnya juga memiliki standar hidup yang tinggi. Dijelaskan oleh Mankiw (2006), bahwa perbedaan pendapatan per kapita mencerminkan perbedaan kualitas hidup, di mana negara yang kaya (pendapatan per kapita tinggi) memiliki kualitas hidup yang lebih baik (tercermin dari angka harapan hidup, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan) di dibandingkan dengan negara miskin. Kemakmuran masyarakat yang tercermin dari pendapatan per kapita penduduk menunjukkan capaian pembangunan suatu negara, artinya apabila PDB per kapita semakin besar maka semakin makmur negara tersebut (Nurhayani, 2012).

Menurut Harianto dan Adi (2007) pendapatan per kapita dapat mengukur pertumbuhan ekonomi secara lebih komprehensif, karena indikator ini menekankan pada kemampuan negara untuk meningkatkan produk domestik bruto (PDB) agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dikuatkan oleh Masniadi (2012), bahwa laju pertumbuhan PDB yang membanggakan tidak dapat dianggap sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat, apabila laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PDB. Dijelaskan juga oleh Pristyadi dan Sukaris (2019), bahwa konsep produk domestik bruto (PDB) saja tidak dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran karena setiap negara memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Oleh sebab itu, pendapatan per kapita menjadi indikator yang relevan dan sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, karena jumlah PDB sebuah negara dibagi dengan jumlah penduduk di negara tersebut (Kuncoro, 2015).

Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian perekonomian makro. Menurut Indriyani (2016), inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus atau suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (*price level*). Inflasi menjadi faktor fundamental makro ekonomi yang menggambarkan kondisi ekonomi yang kurang sehat, karena harga-harga barang secara umum meningkat (Sudiyatno & Nuswandhari, 2009). Inflasi juga diartikan sebagai penurunan nilai uang secara menyeluruh, semakin tinggi kenaikan harga makin turun nilai uang (Sudarsana & Candraningrat, 2014). Persentase dari kenaikan harga-harga tersebut yang dinamakan tingkat inflasi (Acemoglu et al, 2019).

Dari beberapa pengertian di atas, seperti yang dikatakan oleh Santosa (2017) bahwa definisi inflasi mencakup aspek-aspek berikut:

- a) *Tendency*, yaitu berupa kecenderungan harga-harga untuk meningkat, artinya dalam suatu waktu tertentu dimungkinkan terjadinya penurunan harga tetapi secara keseluruhan mempunyai kecenderungan meningkat.

- b) *Sustained*, kenaikan harga yang terjadi tidak hanya berlangsung dalam waktu tertentu saja, melainkan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama.
- c) *General level of price*, harga dalam konteks inflasi dimaksudkan sebagai harga barang-barang secara umum, bukan dalam artian satu atau dua jenis barang saja.

Menurut Soesastro (2005), inflasi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediaannya, di mana permintaan melebihi persediaan, dan semakin besar perbedaan itu semakin besar bahaya yang ditimbulkan bagi perekonomian. Menurut Hismendi et al (2013), secara keseluruhan inflasi yang sedang berlangsung tergantung pada: 1) permintaan, seperti yang ditunjukkan oleh senjang inflasi atau senjang resesi, 2) kenaikan biaya yang diharapkan (*expectations*) dari masyarakat, dan 3) serangkaian kekuatan luar yang datang terutama dari sisi penawaran. Faktor-faktor tersebut menentukan proses terjadinya inflasi yang bisa berdampak pada kesehatan ekonomi. Namun, seperti yang dikatakan oleh Pracoyo dan Pracoyo (2005) bahwa inflasi tidak selalu berdampak buruk pada kesehatan ekonomi, asalkan laju inflasi masih berada pada tingkat yang aman. Inflasi menjadi suatu masalah bila lajunya tinggi dan berkelanjutan, karena dapat mempengaruhi kesehatan ekonomi dan mengganggu usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sitinjak, 2016).

Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi utama yang sering di hadapi oleh setiap negara, karena dapat mengakibatkan efek buruk yang bersifat ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Sukirno (2016), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja (*labor force*) ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Falianty (2019), menjelaskan bahwa pengangguran yaitu orang yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (penduduk usia 15-59 tahun, ada beberapa negara lain memakai usia 15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2019), menggolongkan penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi adalah penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2019). Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran (Sukirno, 2016). Bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja disebut tingkat pengangguran (Sumarsono, 2009).

Badan Pusat Statistik (2019), menyatakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja disebut tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berdasarkan pada “*An ILO Manual on Concepts and Methods*”, Badan Pusat Statistik (2019) menjelaskan bahwa pengangguran terbuka terdiri atas penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

Menurut Gumilang et al, (2014) tingkat pengangguran dalam suatu negara dapat digunakan sebagai indikator untuk menganalisis sehat atau tidaknya perekonomian negara tersebut. Tingkat pengangguran cenderung bergerak berlawanan dengan siklus usaha, di mana ketika output produksi merosot, maka tingkat permintaan tenaga kerja berkurang sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat (Samuelson & Nordhaus, 1994). Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengangguran menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja (Murtadho, 2008). Pengangguran juga menunjukkan adanya sumber daya yang terbuang, karena para

penganggur sebenarnya memiliki potensi untuk berkontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak melakukannya (Mankiw, 2006). Tingginya angka pengangguran dapat menggambarkan kapasitas operasi ekonomi yang belum dimanfaatkan dengan baik (Yacoub, 2012).

Menurut Hardana (2015), pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena bagaimanapun baik dan hebatnya kemampuan suatu negara dalam menangani perekonomiannya, tetap saja pengangguran itu ada. Maka dari itu, dalam analisis makro, kondisi yang diharapkan bukan bagaimana mempekerjakan semua tenaga kerja yang mencari pekerjaan dengan menyediakan lapangan kerja secara sporadis, melainkan bagaimana caranya agar setiap lowongan kerja yang disediakan pada suatu periode tertentu dapat terisi semuanya oleh pencari kerja (Pristyadi & Sukaris, 2019). Jika kondisi semua lowongan pekerjaan terisi penuh oleh para pencari kerja, maka inilah yang disebut dalam ilmu ekonomi sebagai keadaan “*full employment*”, namun *full employment* bukan berarti kondisi yang sama sekali tidak ada pengangguran (Samuelson & Nordhaus, 1994). *Full employment* berarti kondisi di mana suatu perekonomian hanya terdapat pengangguran kurang dari 4 persen (per tahun) dari jumlah tenaga kerja (Larasati & Sulasmiyati, 2018).

Berdasarkan teori-teori yang telah dibahas maka hipotesa yang diuji dalam penelitian ini adalah:

- Ha1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sembilan negara ASEAN tahun 2015-2018 memiliki perbedaan yang signifikan.**
- Ha2: PDB per kapita Indonesia dan sembilan negara ASEAN tahun 2015-2018 memiliki perbedaan yang signifikan.**
- Ha3: Tingkat inflasi Indonesia dan sembilan negara ASEAN tahun 2015-2018 memiliki perbedaan yang signifikan.**
- Ha4: Tingkat pengangguran Indonesia dan sembilan negara ASEAN tahun 2015-2018 memiliki perbedaan yang signifikan.**

Metodologi Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Menurut Kasiram (2008) penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Metode kuantitatif melibatkan angka-angka dan teknik analisis yang menggunakan statistik, sehingga pendekatan penelitian ini menyatakan bahwa keberadaan sesuatu merupakan besaran yang dapat diukur (Mulyadi, 2011).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif (*descriptive comparative*). Metode deskriptif komparatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kebenaran empiris dari suatu hipotesis yakni kebenaran empiris dari perbedaan antara dua atau lebih variabel penelitian yang dinyatakan pada hipotesis (Cooper & Schindler, 2013). Metode deskriptif komparatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Widiasworo, 2019).

Adapun definisi operasional sebagai penjelasan definisi variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis (Sujarweni, 2019). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel yang bersifat independen (tidak berhubungan) sebanyak dua variabel, yakni indikator makro ekonomi Indonesia dan indikator makro ekonomi sembilan negara ASEAN tahun 2015-2018. Masing-masing variabel terdiri atas empat indikator (pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran). Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut

adalah sebagai berikut:

1. *Pertumbuhan ekonomi* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia dan sembilan negara ASEAN tahun 2015-2018, berupa data persentase perubahan tahunan (*% annual change*) nilai PDB riil (*constant 2010*) dalam mata uang dollar Amerika Serikat (US\$). Data pertumbuhan ekonomi tersebut diambil dari website resmi World Bank Group.
2. *PDB per kapita* yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB per kapita nasional Indonesia dan sembilan negara ASEAN tahun 2015-2018, berupa data tahunan nilai PDB per kapita nominal dalam mata uang dollar Amerika Serikat (US\$) yang menggunakan penghitungan berbasis *Purchasing Power Parity (GDP Per Capita– PPP)*. Data PDB per kapita tersebut diambil dari website resmi World Bank Group.
3. *Tingkat inflasi* yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi nasional Indonesia dan sembilan negara ASEAN tahun 2015-2018, berupa data persentase perubahan tahunan (*% annual change*) indeks harga konsumen (IHK). Data tingkat inflasi tersebut diambil dari website resmi Asian Development Bank.
4. *Tingkat pengangguran* yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran nasional Indonesia dan sembilan negara ASEAN tahun 2015-2018, berupa data persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (*% of total labor force*) tahunan, yang menggunakan model penghitungan *International Labour Organization (ILO) modelled estimates*. *ILO modelled estimates* merupakan serangkaian model ekonometrik yang dikembangkan dan digunakan oleh ILO untuk menghasilkan perkiraan indikator pasar tenaga kerja per tahun di berbagai negara, di mana terdapat beberapa data ketenagakerjaan yang tidak tersedia karena tidak dilaporkan secara rutin per tahun oleh negara-negara tertentu (International Labour Organization, 2019). Data tingkat pengangguran tersebut diambil dari website resmi International Labour Organization.

Prosedur pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi melalui dua tahapan. Pengumpulan data tahap pertama, yaitu dengan mencari informasi terkait variabel, teori, dan pokok bahasan yang digunakan dalam penelitian ini (studi kepustakaan). Kemudian pengumpulan data tahap kedua, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yang diunduh dari website resmi World Bank Group, Asian Development Bank, dan International Labour Organization berupa data *softcopy*. Data-data yang diambil adalah data tahunan (*annually*) indikator pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto per kapita (PDB per kapita), tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran Indonesia dan sembilan negara ASEAN tahun 2015-2018, dengan jumlah data sebanyak 160 data. Metode pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini disebut dokumentasi, dengan mengumpulkan data-data dan berbagai informasi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Kantor Staf Presiden RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Asian Development Bank (ADB), International Labour Organization (ILO), dan World Bank (WB) Group.

Penelitian ini menggunakan uji komparasi parametrik (uji beda parametrik) dengan menggunakan sampel independen (*independent sample*). Menurut Sujarweni (2019), uji komparasi parametrik merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengukur perbedaan rata-rata dua sampel atau lebih (k sampel), yang menggunakan data berbentuk interval dan/atau rasio yang terdistribusi normal atau jumlah sampel yang cukup (≥ 30 sampel). Dalam penelitian ini, uji komparasi parametrik dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode uji statistik, yaitu *One Way ANOVA* dan *Tukey test*.

Adapun teknik analisis data sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian (Sujarweni, 2019). Teknik analisis data melibatkan tahapan-tahapan untuk melakukan analisis data. Teknik

analisis data dalam penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahap pertama, adalah tabulasi data-data indikator makro ekonomi Indonesia dan sembilan negara ASEAN tahun 2015-2018.
2. Tahap kedua, adalah uji beda *One way ANOVA (F-test)* pada semua sampel yang diteliti (sampel independen). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara indikator makro ekonomi Indonesia dan sembilan negara ASEAN tahun 2015-2018. Nilai signifikan kurang dari 0.05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.
3. Tahap ketiga, adalah uji beda *Tukey test (HSD-test)* pada semua sampel yang diteliti (sampel independen). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa indikator makroekonomi negara ASEAN manakah (Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam) yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan indikator makro ekonomi Indonesia tahun 2015-2018.

Pembahasan dan Analisis Hasil

Indikator Makro Ekonomi Indonesia

Meskipun kenaikan dalam pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2015, tingkat pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2015 hanya sebesar 4,9 persen, turun dari angka 5,0 persen tahun 2014. Tingkat pertumbuhan ini paling lambat pascakrisis keuangan global 2009. Pertumbuhan konsumsi swasta yang merupakan kontributor terbesar terhadap pertumbuhan PDB melambat karena penurunan pendapatan pedesaan, inflasi yang lebih tinggi, kredit konsumen yang lebih ketat, dan pasar tenaga kerja yang lemah (Asian Development Bank, 2016). Sedangkan untuk pendapatan per kapita, PDB per kapita nominal Indonesia naik dari angka Rp 41,92 juta tahun 2014 menjadi Rp 45,12 juta tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2016). Namun akibat terjadi depresi rupiah terhadap dollar Amerika sebesar 10,59 persen sepanjang tahun 2014, nilai pendapatan per kapita Indonesia dalam dollar menurun dari US\$ 3,492 pada 2014 menjadi US\$ 3,332 pada 2015 (Gumelar, 2016). Sesuai dengan data BPS tersebut, data Asian Development Bank (2016) menunjukkan bahwa peningkatan PDB per kapita di ikuti dengan pertambahan jumlah penduduk sebesar 252,16 juta jiwa tahun 2014 meningkat menjadi 255,46 juta jiwa tahun 2015. Dari sisi harga, inflasi melambat secara bertahap dari 8,4 persen pada akhir 2014, kemudian melambat tajam pada akhir 2015 karena mulai pulihnya dampak dari kenaikan harga bahan bakar pada 2014. Pada bulan Desember, inflasi mereda secara *year on year (y-o-y)* menjadi 3,4 persen, namun inflasi rata-rata tahun 2015 tetap tinggi pada angka 6,4 persen karena kenaikan harga bahan bakar tahun 2014, kekeringan akibat El Nino, pembatasan impor bahan makanan, dan depresiasi rupiah (Asian Development Bank, 2016). Dari sisi ketenagakerjaan, berdasarkan data International Labour Organization (2016), tingkat pengangguran nasional mengalami peningkatan menjadi 4,5 persen dari angka 4,0 persen tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran yang meningkat pada tahun 2015 sebagai akibat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang membuat banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga banyak tenaga kerja (angkatan kerja) yang tidak terserap (Badan Pusat Statistik, 2016).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 meningkat menjadi 5,0 persen dari angka 4,9 persen pada 2015. Konsumsi yang kuat mendukung pertumbuhan PDB meskipun investasi sedang melambat. Dengan menguatnya kepercayaan konsumen, konsumsi swasta juga tumbuh sepanjang tahun 2016. Investasi diredam oleh keterlambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek investasi publik dan lemahnya permintaan eksternal (Asian Development Bank, 2017). Sedangkan untuk pendapatan per kapita, PDB per kapita nominal Indonesia tetap merangkak naik menjadi Rp 47,94 juta dari angka Rp 45,12 juta tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik,

2017). Angka PDB per kapita tersebut jika dikonversikan ke dollar setara dengan US\$ 3,563. Sesuai dengan data BPS tersebut, data Asian Development Bank (2017) menunjukkan bahwa peningkatan PDB per kapita tersebut di ikuti dengan pertambahan jumlah penduduk sebesar 255,46 juta jiwa tahun 2015 meningkat menjadi 258,71 juta jiwa tahun 2016. Dari sisi harga, inflasi rata-rata sepanjang tahun tercatat sebesar 3,5 persen, dan berada dalam target 3-5 persen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Meskipun harga makanan sempat naik untuk beberapa waktu akibat keterbatasan pasokan dan distribusi, harga kembali mereda setelah pemerintah meningkatkan impor makanan (Asian Development Bank, 2017). Dari sisi ketenagakerjaan, berdasarkan data International Labour Organization (2017), tingkat pengangguran nasional akhirnya menurun dari angka 4,5 persen tahun 2015 menjadi 4,3 persen tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi yang kembali meningkat mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2017).

Pertumbuhan ekonomi naik tipis menjadi 5,1 persen pada 2017 dari angka 5,0 persen tahun 2016. Pertumbuhan ini didorong oleh akselerasi dalam pertumbuhan ekspor, investasi yang mulai meningkat, dan konsumsi swasta yang didorong oleh pasar kerja yang kuat. Ekspor barang dan jasa yang berkontraksi selama dua tahun terakhir akhirnya naik sepanjang tahun 2017. Didukung oleh pengeluaran infrastruktur publik dan investasi swasta yang kuat berhasil mendorong pertumbuhan sektor pembentukan modal tetap (Asian Development Bank, 2018). Sedangkan untuk pendapatan per kapita, PDB per kapita nominal Indonesia mencapai angka Rp 51,88 juta atau naik Rp 3,94 juta dari tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2018). Angka PDB per kapita tersebut jika dikonversikan ke dollar setara dengan US\$ 3,837. Sesuai dengan data BPS tersebut, data Asian Development Bank (2018) menunjukkan bahwa peningkatan PDB per kapita tersebut di ikuti dengan pertambahan jumlah penduduk sebesar 258,71 juta jiwa tahun 2016 meningkat menjadi 261,89 juta jiwa tahun 2017. Dari sisi harga, inflasi rata-rata tercatat sebesar 3,8 persen tahun 2017, sedikit naik dari angka 3,5 persen tahun 2016 akibat kenaikan tarif listrik dan pasokan energi meskipun harga untuk sebagian besar produk lainnya sedang menurun. Inflasi inti menurun sejak tahun 2015, sehingga mencerminkan stabilitas nilai tukar dan ekspektasi inflasi (Asian Development Bank, 2018). Dari sisi ketenagakerjaan, berdasarkan data International Labour Organization (2018), tingkat pengangguran nasional kembali menurun menjadi 4,2 persen dari angka 4,3 persen tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan investasi yang meningkat sehingga menciptakan adanya pertumbuhan lapangan kerja (Badan Pusat Statistik, 2018).

Pertumbuhan ekonomi meningkat tipis dari angka 5,1 persen tahun 2017 menjadi 5,2 persen tahun 2018. Investasi domestik dan konsumsi domestik yang kuat memungkinkan ekonomi tumbuh dengan laju tercepat sejak tahun 2013, meskipun ekspor sedang menurun. Kinerja investasi sebagian besar didorong oleh proyek infrastruktur publik untuk transportasi dan energi, dan sektor pertanian yang mulai pulih setelah melambat pada tahun 2017 (Asian Development Bank, 2019). Sedangkan untuk pendapatan per kapita, PDB per kapita nominal Indonesia mencapai Rp 55,99 juta dari angka Rp 51,88 juta tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2019). Angka PDB per kapita tersebut jika dikonversikan ke dollar setara dengan US\$ 3,894. Sesuai dengan data BPS tersebut, data Asian Development Bank (2019) menunjukkan bahwa peningkatan PDB per kapita tersebut di ikuti dengan pertambahan jumlah penduduk sebesar 261,89 juta jiwa tahun 2017 meningkat menjadi 265,00 juta jiwa tahun 2018. Dari sisi harga, inflasi justru menuruni dari angka rata-rata 3,8 persen tahun 2017 menjadi 3,2 persen tahun 2018. Turunnya laju Inflasi ini dipengaruhi oleh persediaan makanan yang cukup karena produksi pertanian yang berkelanjutan, manajemen pasokan makanan yang tepat, dan harga bahan bakar dan listrik yang tetap stabil karena subsidi pemerintah. Inflasi rata-rata berada dalam target 2,5-4,5 persen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Asian Development Bank, 2019). Dari sisi ketenagakerjaan, berdasarkan data International Labour Organization (2019), secara keseluruhan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2015-2018 dominan menurun.

Tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,5 persen (2015) menurun menjadi 4,3 persen (2016), kemudian menurun menjadi 4,2 persen (2017), dan kembali meningkat menjadi 4,3 persen (2018). Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2019), selama tahun 2015 hingga desember 2018, lapangan kerja baru telah tercipta bagi sebanyak 10.340.690 orang. Hal ini menunjukkan bahwa target penciptaan 10 juta lapangan kerja baru pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2015-2019 telah berhasil dicapai.

Deskriptif Statistik Data Penelitian

Untuk tujuan operasional dan analitikal, peneliti mengklasifikasikan negara-negara ASEAN ke dalam 2 (dua) klaster, yaitu negara berpenghasilan tinggi (*high income countries/ HIC*) dan negara berpenghasilan menengah (*middle income countries/ MIC*). Menurut World Bank (2019), sepanjang tahun 2015-2018, negara ASEAN yang termasuk dalam golongan negara berpenghasilan tinggi (*high income countries/ HIC*) adalah Brunei Darussalam dan Singapura, dan negara berpenghasilan menengah (*middle income countries/ MIC*) adalah Indonesia, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand dan Vietnam.

Pertumbuhan Ekonomi

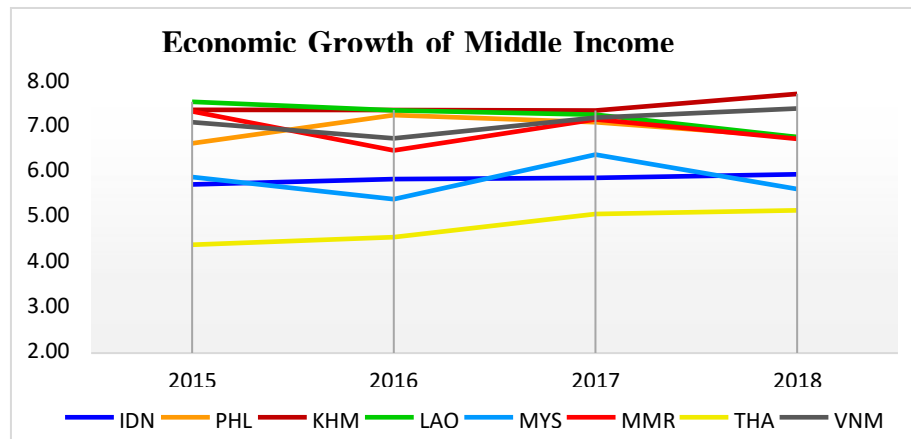
Tabel 1
Deskriptif Statistik Pertumbuhan Ekonomi

Descriptives					
Pertumbuhan Ekonomi (percentage %)					
Economy	Country	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
HIC	Brunei Darussalam	-.4150	1.58201	-2.47	1.33
	Singapura	3.1725	.36709	2.89	3.70
MIC	Indonesia	5.0375	.12038	4.88	5.17
	Filipina	6.4675	.37642	6.07	6.88
	Kamboja	7.1475	.23514	7.02	7.50
	Laos	6.8575	.43462	6.25	7.27
	Malaysia	5.0050	.55549	4.45	5.74
	Myanmar	6.4525	.51584	5.86	6.99
	Thailand	3.6600	.49037	3.13	4.13
	Vietnam	6.6950	.36373	6.21	7.08
ASEAN 10	Total	5.0080	2.32370	-2.47	7.50

Tabel 1 memberikan gambaran tentang deskriptif statistik untuk variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 9 negara ASEAN tahun 2015-2018 (N= 40). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase rata-rata (*mean*) untuk variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 5.04 persen.

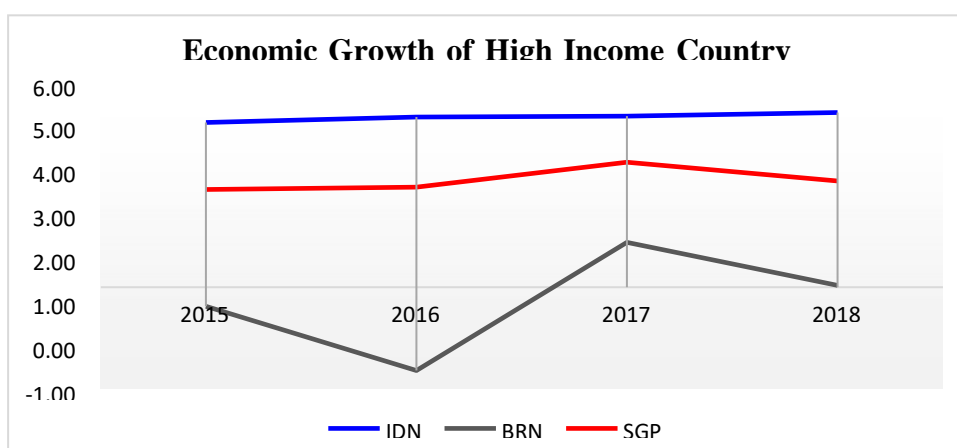
Jika dilihat menurut golongan HIC, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Singapura yang tercatat sebesar 3.17 persen dan Brunei Darussalam dengan pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -0.41 persen. Jika dibandingkan ke dalam golongan MIC, Indonesia sebagai sesama negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Malaysia yang tercatat sebesar 5.01 persen dan Thailand sebesar 3.66 persen, namun lebih rendah dari Kamboja yang tercatat sebesar 7.15 persen, Laos sebesar 6.86 persen, Vietnam sebesar 6.69 persen, Filipina sebesar 6.47 persen, dan Myanmar sebesar 6.45 persen. Dengan demikian, persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati urutan ke-6 di antara 10 negara ASEAN, sedangkan yang tertinggi adalah Kamboja dan yang terendah adalah Brunei Darussalam yang mencatatkan

pertumbuhan ekonomi negatif.



Grafik 1
Pertumbuhan Ekonomi Middle Income Country

Pada grafik 1 memberikan informasi mengenai perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di antara negara-negara berpenghasilan menengah (*middle income countries*) di kawasan ASEAN sepanjang tahun 2015-2018. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015-2018 (*y-o-y*) konsisten meningkat namun cenderung stagnan, dengan persentase di tahun 2015 sebesar 4.88 persen, tahun 2016 sebesar 5.03 persen, tahun 2017 sebesar 5.07 persen, dan tahun 2018 sebesar 5.17 persen. Sepanjang tahun 2015-2018, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi Thailand, namun berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, dan Myanmar, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Malaysia sempat berada di atas Indonesia tahun 2015 dan 2017. Secara akselerasi, laju pertumbuhan ekonomi Thailand, Kamboja, dan Vietnam lebih cepat dibandingkan Indonesia yang cenderung lambat akibat pertumbuhan ekonomi stagnan. Kamboja menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara ASEAN berpenghasilan menengah dan mencapai persentase tertingginya sebesar 7.50 persen di tahun 2018, sedangkan yang terendah adalah Thailand dengan persentase pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 3.13 persen di tahun 2015.



Grafik 2
Pertumbuhan Ekonomi High Income Country

Pada grafik 2 memberikan informasi mengenai perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di antara negara-negara berpenghasilan tinggi (*high income countries*) di kawasan ASEAN sepanjang tahun 2015-2018. Sebagai negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2015-2018 berada di atas pertumbuhan ekonomi Singapura dan Brunei Darussalam sebagai negara maju. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Singapura cenderung meningkat secara dominan, namun Singapura sempat melambat di tahun 2018. Begitu pula dengan Brunei Darussalam yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di tahun 2015 dan 2016, namun akhirnya berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif secara akselerasi di tahun 2017 meskipun kembali melambat di tahun 2018. Singapura menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk golongan negara ASEAN berpenghasilan tinggi dan mencapai angka tertingginya sebesar 3.70 persen di tahun 2017, sedangkan Brunei Darussalam sebesar 1.33 persen di tahun yang sama.

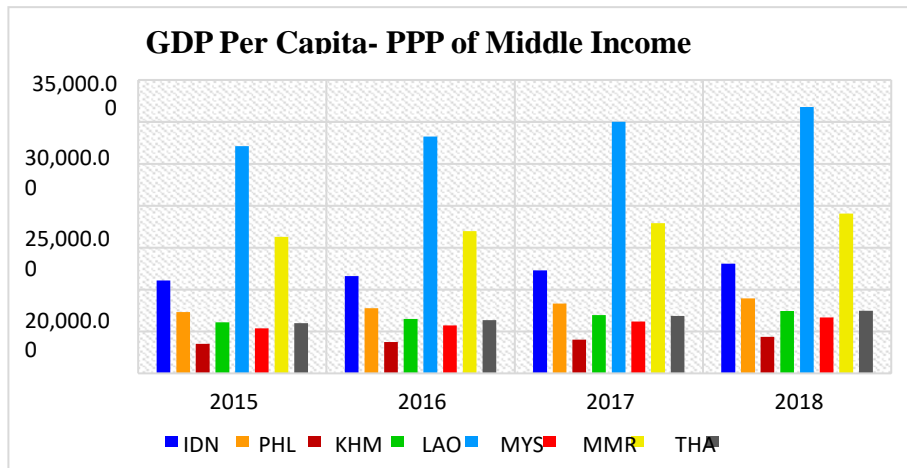
PDB Per Kapita- Purchasing Power Parity (PPP)

Tabel 2
Deskriptif Statistik PDB Per Kapita- PPP

<u>Economy</u>	<u>Country</u>	<u>Mean</u>	<u>Std. Deviation</u>	<u>Minimum</u>	<u>Maximum</u>
HIC	Brunei Darussalam	79755.4925	1177.95379	78134.67	80920.05
	Singapura	94635.9325	5568.99549	89007.46	101531.63
MIC	Indonesia	12006.5975	871.32080	11063.06	13079.62
	Filipina	8097.2425	707.24198	7313.41	8951.09
	Kamboja	3909.3275	365.21892	3513.82	4360.85
	Laos	6732.7575	589.42194	6075.95	7439.60
	Malaysia	29292.6650	2046.41132	27116.58	31782.15
	Myanmar	5982.1325	565.98463	5372.24	6674.03
	Thailand	17555.8550	1199.14090	16293.61	19051.33
	Vietnam	6665.2100	631.34981	5989.76	7447.81
ASEAN 10	Total	26463.3213	31802.28180	3513.82	101531.63

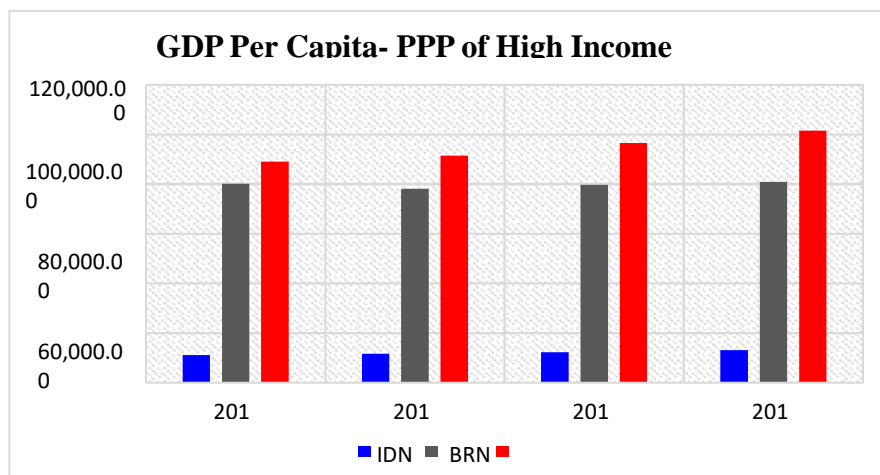
Tabel 2 memberikan gambaran tentang deskriptif statistik untuk variabel PDB per kapita- PPP Indonesia dan 9 negara ASEAN tahun 2015-2018 (N= 40). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (*mean*) untuk variabel PDB per kapita- PPP Indonesia adalah sebesar US\$12,006.60.

Jika dilihat menurut golongan HIC, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki PDB per kapita- PPP yang lebih rendah dari Singapura dan Brunei Darussalam, dengan selisis US\$82,629.34 dari angka US\$94,635.93 PDB per kapita- PPP Singapura, dan selisis US\$67,748.89 dari angka US\$79,755.49 PDB per kapita- PPP Brunei Darussalam. Jika dibandingkan ke dalam golongan MIC, Indonesia sebagai sesama negara berkembang memiliki PDB per kapita- PPP yang lebih tinggi dari Filipina yang tercatat sebesar US\$8,097.24, Laos sebesar US\$6,732.76, Vietnam sebesar US\$6,665.21, Myanmar sebesar US\$5,982.13, dan Kamboja sebesar US\$3,909.33, namun lebih rendah dari Malaysia yang tercatat sebesar US\$29,292.66 dan Thailand sebesar US\$17,555.85. Dengan demikian, nilai nominal rata-rata PDB per kapita- PPP Indonesia menempati urutan ke-5 di antara 10 negara ASEAN, sedangkan yang tertinggi adalah Singapura dan yang terendah adalah Kamboja.



Grafik 3
PDB Per Kapita- PPP Middle Income Country

Pada grafik 3 memberikan informasi mengenai perbandingan PDB per kapita- PPP Indonesia di antara negara-negara berpenghasilan menengah (*middle income countries*) di kawasan ASEAN sepanjang tahun 2015-2018. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa PDB per kapita- PPP Indonesia tahun 2015-2018 (*y-o-y*) terus meningkat secara konsisten, dengan angka PDB per kapita- PPP di tahun 2015 sebesar US\$11,063.06, tahun 2016 sebesar US\$11,604.53, tahun 2017 sebesar US\$12,279.18, dan tahun 2018 sebesar US\$13,079.62. Sepanjang tahun 2015-2018, PDB per kapita- PPP Indonesia berada jauh di bawah PDB per kapita- PPP Malaysia dan Thailand, namun berada di atas PDB per kapita- PPP Filipina, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Meskipun meningkat secara konsisten, PDB per kapita- PPP Indonesia cenderung stagnan jika dibandingkan dengan PDB per kapita- PPP Malaysia dan Thailand yang meningkat cukup signifikan. Malaysia menjadi negara dengan PDB per kapita- PPP tertinggi di antara negara-negara ASEAN berpenghasilan menengah dan mencapai angka tertingginya sebesar US\$31,782.15 di tahun 2018, sedangkan yang terendah adalah Kamboja dengan angka PDB per kapita- PPP terendah sebesar US\$3,513.82 di tahun 2015.



Grafik 4
PDB Per Kapita- PPP High Income Country

Pada grafik 4 memberikan informasi mengenai perbandingan PDB per kapita- PPP Indonesia di antara negara-negara berpenghasilan tinggi (*high income countries*) di kawasan ASEAN sepanjang tahun 2015-2018. Sebagai negara berkembang, PDB per kapita- PPP Indonesia sepanjang tahun 2015-2018 masih berada jauh di bawah PDB per kapita- PPP Singapura dan Brunei Darussalam sebagai negara maju. Meskipun meningkat secara konsisten, PDB per kapita- PPP Indonesia cenderung stagnan jika dibandingkan dengan Singapura yang meningkat secara signifikan, namun berbeda dengan Brunei Darussalam yang sempat menurun di tahun 2016 dan kembali meningkat di tahun 2017 hingga 2018. Singapura menjadi negara dengan PDB per kapita- PPP tertinggi di antara negara-negara ASEAN dan mencapai angka tertingginya sebesar US\$101,531.63 di tahun 2018, dan disusul oleh Brunei Darussalam sebesar US\$ 80,920.05 di tahun yang sama.

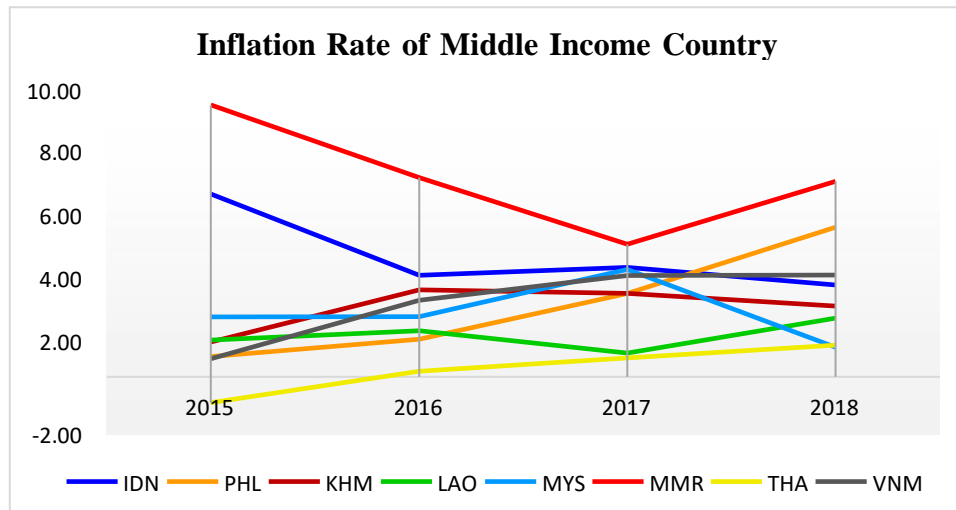
Tingkat Inflasi

Tabel 3
Deskriptif Statistik Tingkat Inflasi

Economy	Country	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
HIC	Brunei Darussalam	-.2950	.37740	-.74	.15
	Singapura	-.0125	.60605	-.54	.58
MIC	Indonesia	4.2250	1.44500	3.20	6.36
	Filipina	2.5250	2.01060	.70	5.20
	Kamboja	2.4025	.83200	1.21	3.03
	Laos	1.4375	.51097	.83	2.04
	Malaysia	2.2350	1.11494	1.03	3.73
	Myanmar	6.9475	1.97893	4.61	9.45
	Thailand	.2625	.85947	-.90	1.10
	Vietnam	2.5900	1.37023	.63	3.54
ASEAN 10	Total	2.2318	2.35147	-.90	9.45

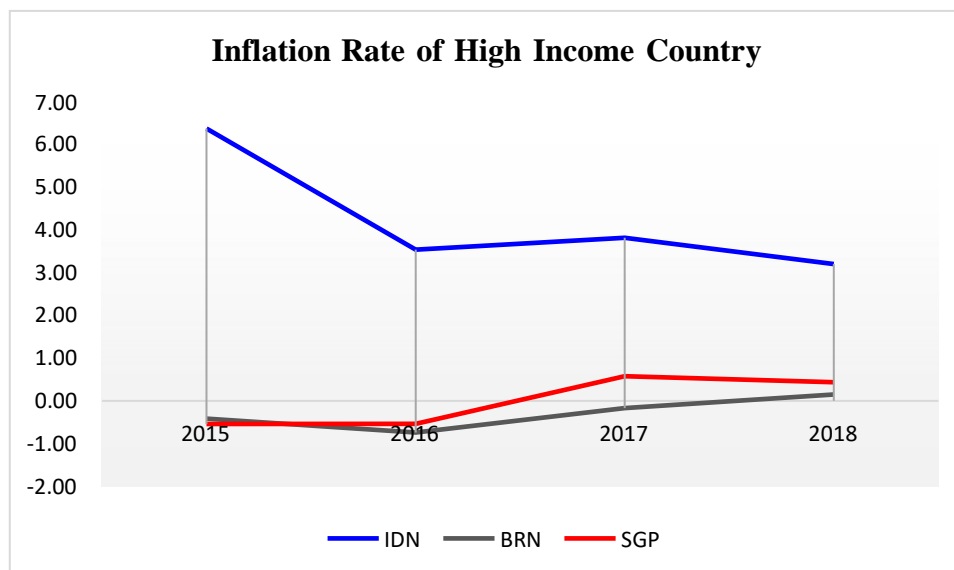
Tabel 3 memberikan gambaran tentang deskriptif statistik untuk variabel tingkat inflasi Indonesia dan 9 negara ASEAN tahun 2015-2018 (N= 40). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase rata-rata (*mean*) untuk variabel tingkat inflasi Indonesia adalah sebesar 4.22 persen.

Jika dilihat menurut golongan HIC, Indonesia sebagai negara berkembang yang mencatatkan inflasi berbeda dengan Singapura dan Brunei Darussalam yang justru mencatatkan deflasi dengan persentase masing-masing sebesar -0.01 persen dan -0.29 persen. Jika dibandingkan ke dalam golongan MIC, Indonesia sebagai sesama negara berkembang memiliki tingkat inflasi lebih rendah dari Myanmar yang tercatat sebesar 6.95 persen, namun lebih tinggi dari Vietnam yang tercatat sebesar 2.59 persen, Filipina sebesar 2.53 persen, Kamboja sebesar 2.40 persen, Malaysia sebesar 2.24 persen, Laos sebesar 1.43 persen, dan Thailand sebesar 0.26 persen. Dengan demikian, persentase rata-rata tingkat inflasi di Indonesia menempati urutan ke-2 di antara 10 negara ASEAN, sedangkan yang tertinggi adalah Myanmar dan yang terendah adalah Brunei Darussalam yang mencatatkan deflasi.



Grafik 5
Tingkat Inflasi Middle Income Country

Pada grafik 5 memberikan informasi mengenai perbandingan tingkat inflasi di Indonesia di antara negara-negara berpenghasilan menengah (*middle income countries*) di kawasan ASEAN sepanjang tahun 2015-2018. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa tingkat inflasi di Indonesia tahun 2015-2018 (*y-o-y*) secara dominan cenderung menurun, dengan persentase di tahun 2015 sebesar 6.36 persen, tahun 2016 sebesar 3.53 persen, tahun 2017 sebesar 3.81 persen, dan tahun 2018 sebesar 3.20 persen. Sepanjang tahun 2015-2018, tingkat inflasi di Indonesia lebih rendah dari tingkat inflasi Myanmar, namun lebih tinggi dari tingkat inflasi Kamboja, Malaysia, Laos, dan Thailand, sedangkan tingkat inflasi Filipina dan Vietnam lebih rendah dari Indonesia di tahun 2015-2017. Thailand menjadi negara dengan tingkat inflasi terendah di antara negara-negara ASEAN berpenghasilan menengah dan sempat mencatatkan deflasi sebesar -0.90 persen di tahun 2015, sedangkan yang tertinggi adalah Myanmar yang mencapai tingkat inflasi tertinggi sebesar 9.45 persen di tahun 2015.



Grafik 6
Tingkat Inflasi High Income Country

Pada grafik 6 memberikan informasi mengenai perbandingan tingkat inflasi di Indonesia di antara negara-negara berpenghasilan tinggi (*high income countries*) di kawasan ASEAN sepanjang tahun 2015-2018. Sebagai negara berkembang, tingkat inflasi di Indonesiasepanjang tahun 2015-2018 berada jauh di atas tingkat inflasi Singapura dan Brunei Darussalam, bahkan grafik diatas menunjukkan bahwa Singapura dan Brunei Darussalam sempat mengalami deflasi, masing-masing terjadi di tahun 2015-2016 dan 2015-2017. Singapura mencatatkan inflasi di dua tahun terakhir, sedangkan Brunei Darussalam baru mencatatkan inflasi di tahun terakhir. Singapura menjadi negara dengan tingkat inflasi tertinggi untuk golongan negara ASEAN berpenghasilan tinggi dan mencapai persentase tertingginya sebesar 0.58 persen di tahun 2017, sedangkan yang terendah yaitu Brunei Darussalam dengan mencatatkan deflasi sebesar -0.74 persen di tahun 2016.

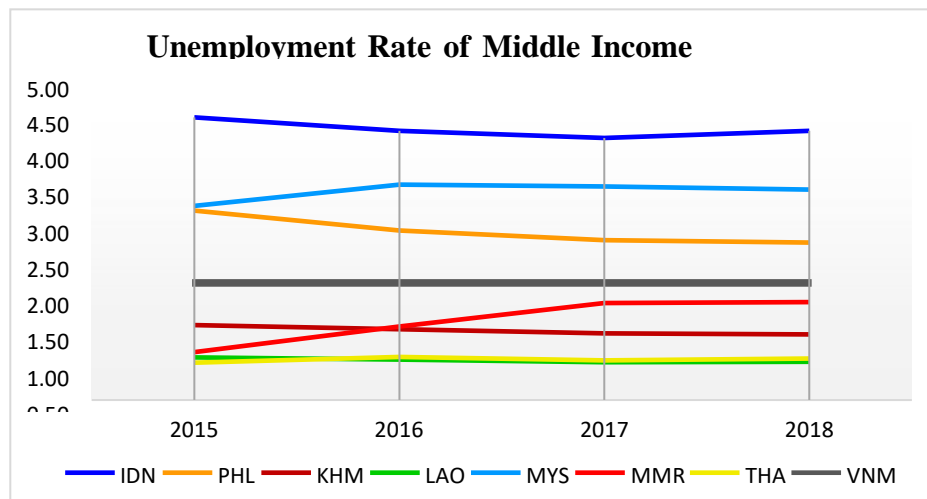
Tingkat Pengangguran

Tabel 4
Deskriptif Statistik Tingkat Pengangguran

Economy	Country	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
HIC	Brunei Darussalam	8.7150	.72044	7.76	9.32
	Singapura	3.8875	.14245	3.77	4.08
MIC	Indonesia	4.3225	.13720	4.18	4.51
	Filipina	2.7025	.23372	2.52	3.03
	Kamboja	1.1100	.06976	1.05	1.20
	Laos	.6350	.03697	.60	.68
	Malaysia	3.3275	.15521	3.10	3.44
	Myanmar	1.2650	.37439	.77	1.56
	Thailand	.6475	.04031	.60	.69
	Vietnam	1.8725	.02062	1.85	1.89
ASEAN 10	Total	2.8485	2.36934	.60	9.32

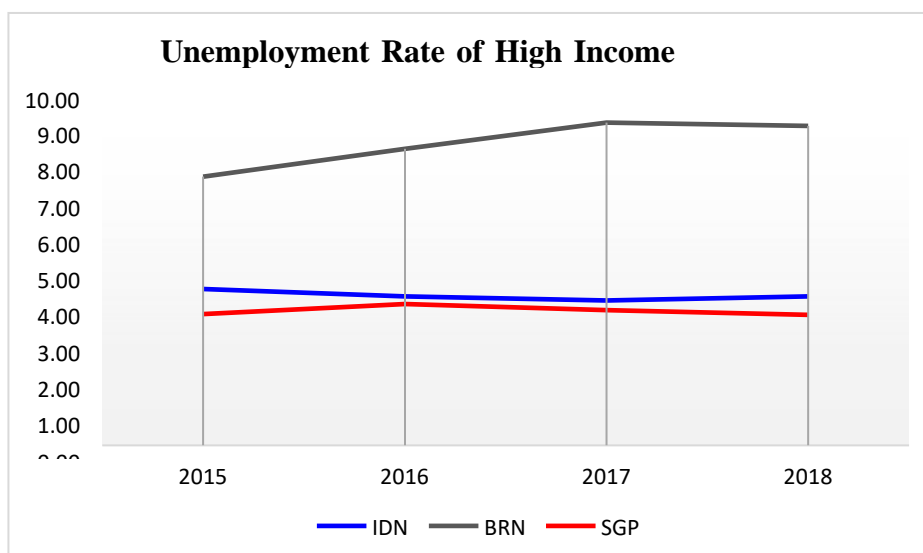
Tabel 4 memberikan gambaran tentang deskriptif statistik untuk variabel tingkat pengangguran Indonesia dan 9 negara ASEAN tahun 2015-2018 (N= 40). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase rata-rata (*mean*) untuk variabel tingkat pengangguran Indonesia adalah sebesar 4.33 persen.

Jika dilihat menurut golongan HIC, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tingkat pengangguran lebih rendah dari Brunei Darussalam yang tercatat sebesar 8.71 persen, namun lebih tinggi dari Singapura yang tercatat sebesar 3.89 persen. Jika dibandingkan ke dalam golongan MIC, Indonesia sebagai sesama negara berkembang memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dari Malaysia yang tercatat sebesar 3.33 persen, Filipina sebesar 2.70 persen, Vietnam sebesar 1.87 persen, Myanmar sebesar 1.26 persen, Kamboja sebesar 1.11 persen, Thailand sebesar 0.65 persen, dan Laos sebesar 0.63 persen. Dengan demikian, persentase rata-rata tingkat pengangguran di Indonesia menempati urutan ke-2 di antara 10 negara ASEAN, sedangkan yang tertinggi adalah Brunei Darussalam dan yang terendah adalah Laos.



Grafik 7
Tingkat Pengangguran Middle Income Country

Pada grafik 7 memberikan informasi mengenai perbandingan tingkat pengangguran di Indonesia di antara negara-negara berpenghasilan menengah (*middle income countries*) di kawasan ASEAN sepanjang tahun 2015-2018. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2015-2018 (*y-o-y*) secara dominan cenderung menurun, dengan persentase di tahun 2015 sebesar 4.51 persen, tahun 2016 sebesar 4.30 persen, tahun 2017 sebesar 4.18 persen, dan tahun 2018 sebesar 4.30 persen. Sepanjang tahun 2015-2018, tingkat pengangguran di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara ASEAN berpenghasilan menengah disusul oleh Malaysia dan Filipina, sedangkan yang terendah adalah Laos dan Thailand. Tingkat pengangguran di Filipina menunjukkan penurunan yang signifikan, sebaliknya Myanmar menunjukkan kenaikan yang signifikan. Tingkat pengangguran terendah dicapai oleh Laos dengan persentase pengangguran terendah sebesar 0.60 persen di tahun 2017, sedangkan yang tertinggi yakni Indonesia terjadi di tahun 2015 dengan persentase tertinggi sebesar 4.51 persen.



Grafik 8
Tingkat Pengangguran High Income Country

Pada grafik 8 memberikan informasi mengenai perbandingan tingkat pengangguran di Indonesia di antara negara-negara berpenghasilan tinggi (*high income countries*) di kawasan ASEAN sepanjang tahun 2015-2018. Sebagai negara berkembang, tingkat pengangguran di Indonesia sepanjang tahun 2015-2018 berada jauh di bawah tingkat pengangguran Brunei Darussalam, namun berada di atas tingkat pengangguran Singapura. Tingkat pengangguran di Brunei Darussalam menunjukkan kenaikan yang signifikan sepanjang tahun 2015-2017, namun akhirnya sedikit menurun di tahun 2018. Sebaliknya, tingkat pengangguran di Singapura secara dominan menunjukkan penurunan dalam dua tahun terakhir setelah sempat naik di tahun 2016. Brunei Darussalam menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi untuk golongan negara ASEAN berpenghasilan tinggi dan mencapai persentase tertingginya sebesar 9.32 persen di tahun 2017, sedangkan yang terendah yakni Singapura dengan persentase terendah sebesar 3.77 persen di tahun 2018.

Pengujian Hipotesis

Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4
Uji One Way ANOVA Indikator Pertumbuhan Ekonomi

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	198.627	9	22.070	55.377	.000
Within Groups	11.956	30	.399		
Total	210.583	39			

Dalam tabel 5 menunjukkan hasil uji *One Way ANOVA* variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi α sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut adalah ≤ 0.05 , dengan demikian maka H_{a1} diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 9 negara ASEAN sepanjang tahun 2015-2018.

Tabel 5
Uji Tukey HSD Indikator Pertumbuhan Ekonomi
Pairwise Comparisons

(I) Negara	(J) Negara	Mean		Sig.	95% Confidence Interval	
		Difference (I-J)	Std. Error		Lower Bound	Upper Bound
Indonesia	Brunei	5.45250*	.44639	.000	3.9298	6.9752
	Darussalam					
	Filipina	-1.43000	.44639	.080	-2.9527	.0927
	Kamboja	-2.11000*	.44639	.002	-3.6327	-.5873
	Laos	-1.82000*	.44639	.010	-3.3427	-.2973
	Malaysia	.03250	.44639	1.000	-1.4902	1.5552
	Myanmar	-1.41500	.44639	.086	-2.9377	.1077
	Singapura	1.86500*	.44639	.008	.3423	3.3877
	Thailand	1.37750	.44639	.103	-.1452	2.9002
Vietnam	-1.65750*	.44639	.024	-3.1802	-.1348	

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Dalam tabel 6 menunjukkan hasil uji *Tukey HSD* variabel pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa di antara 9 negara ASEAN, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara statistik memiliki perbedaan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi Brunei Darussalam dengan nilai signifikansi sebesar .000, Kamboja sebesar .002, Laos sebesar .010, Singapura sebesar .008, dan Vietnam sebesar .024. Hasil dalam tabel tersebut memiliki pola perbedaan yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dari Brunei Darussalam dan Singapura, namun lebih rendah dari Kamboja, Laos, dan Vietnam.

PDB Per Kapita- Purchasing Power Parity

Tabel 6
Uji One Way ANOVA Indikator PDB Per Kapita- PPP

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	39322561496.479		4369173499.608	1079.177	.000
Within Groups	121458478.66	30	4048615.955		
Total	39444019975.13	39			

Dalam tabel 7 menunjukkan hasil uji *One Way ANOVA* variabel PDB per kapita- PPP dengan nilai signifikansi α sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut adalah ≤ 0.05 , dengan demikian maka H_0 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara PDB per kapita- PPP Indonesia dan 9 negara ASEAN sepanjang tahun 2015-2018.

Tabel 7.
Uji Tukey HSD Indikator PDB Per Kapita- PPP

(I) Negara	(J) Negara	Mean		Sig.	95% Confidence Interval	
		Difference (I-J)	Std. Error		Lower Bound	Upper Bound
Indonesia	Brunei	-67748.895*	1422.781	.000	-72602.264	-62895.526
	Darussalam					
	Filipina	3909.355	1422.781	.200	-944.014	8762.724
	Kamboja	8097.270*	1422.781	.000	3243.901	12950.639
	Laos	5273.840*	1422.781	.025	420.471	10127.209
	Malaysia	-17286.067*	1422.781	.000	-22139.436	-12432.698
	Myanmar	6024.465*	1422.781	.007	1171.096	10877.834
	Singapura	-82629.335*	1422.781	.000	-87482.704	-77775.966
	Thailand	-5549.257*	1422.781	.015	-10402.626	-695.888
Vietnam	5341.387*	1422.781	.022	488.018	10194.756	

*The mean difference is significant at the 0.05 level.

Dalam tabel 8 menunjukkan hasil uji *Tukey HSD* variabel PDB per kapita- PPP yang menunjukkan bahwa di antara 9 negara ASEAN, PDB per kapita- PPP Indonesia secara statistik

memiliki perbedaan yang signifikan dengan PDB per kapita- PPP Brunei Darussalam dengan nilai signifikansi sebesar .000, Kamboja sebesar .000, Laos sebesar .025, Malaysia sebesar .000, Myanmar sebesar .007, Singapura sebesar .000, Thailand sebesar .015, dan Vietnam sebesar .022. Hasil dalam tabel tersebut memiliki pola perbedaan yang menunjukkan bahwa PDB per kapita- PPP Indonesia lebih tinggi dari Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, namun lebih rendah dari Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Tingkat Inflasi

Tabel 8
Uji One Way ANOVA Indikator Tingkat Inflasi

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	169.539	9	18.838	12.257	.000
Within Groups	46.107	30	1.537		
Total	215.646	39			

Dalam tabel 9 menunjukkan hasil uji *One Way ANOVA* variabel tingkat inflasi dengan nilai signifikansi α sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut adalah ≤ 0.05 , dengan demikian maka H_{a3} diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat inflasi di Indonesia dan 9 negara ASEAN sepanjang tahun 2015-2018.

Tabel 9
Uji Tukey HSD Indikator Tingkat Inflasi

(I) Negara	(J) Negara	Mean		Sig.	95% Confidence Interval	
		Difference (I-J)	Std. Error		Lower Bound	Upper Bound
Indonesia	Brunei Darussalam	4.52000*	.87661	.001	1.5297	7.5103
	Filipina	1.70000	.87661	.644	-1.2903	4.6903
	Kamboja	1.82250	.87661	.555	-1.1678	4.8128
	Laos	2.78750	.87661	.084	-.2028	5.7778
	Malaysia	1.99000	.87661	.435	-1.0003	4.9803
	Myanmar	-2.72250	.87661	.098	-5.7128	.2678
	Singapura	4.23750*	.87661	.001	1.2472	7.2278
	Thailand	3.96250*	.87661	.003	.9722	6.9528
	Vietnam	1.63500	.87661	.691	-1.3553	4.6253

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Dalam tabel 10 menunjukkan hasil uji *Tukey HSD* variabel tingkat inflasi yang menunjukkan bahwa di antara 9 negara ASEAN, tingkat inflasi di Indonesia secara statistik memiliki perbedaan yang signifikan dengan tingkat inflasi di 3 negara ASEAN, yakni Brunei Darussalam dengan nilai signifikansi sebesar .001, Singapura sebesar .001, dan Thailand sebesar .003. Hasil dalam tabel tersebut memiliki pola perbedaan yang menunjukkan bahwa

tingkat inflasi di Indonesia lebih tinggi dari Thailand, Brunei Darussalam (deflasi), dan Singapura (deflasi).

Tingkat Pengangguran

Tabel 10
Uji One Way ANOVA Indikator Tingkat Pengangguran

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	216.581	9	24.065	306.431	.000
Within Groups	2.356	30	.079		
Total	218.937	39			

Dalam tabel 11 menunjukkan hasil uji *One Way ANOVA* variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi α sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut adalah ≤ 0.05 , dengan demikian maka H_0 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengangguran di Indonesia dan 9 negara ASEAN sepanjang tahun 2015-2018.

Tabel 11
Uji Tukey HSD Indikator Tingkat Pengangguran

(I) Negara	(J) Negara	Mean		Sig.	95% Confidence Interval	
		Difference (I-J)	Std. Error		Lower Bound	Upper Bound
Indonesia	Brunei	-4.39250*	.19816	.000	-5.0684	-3.7166
	Darussalam					
	Filipina	1.62000*	.19816	.000	.9441	2.2959
	Kamboja	3.21250*	.19816	.000	2.5366	3.8884
	Laos	3.68750*	.19816	.000	3.0116	4.3634
	Malaysia	.99500*	.19816	.001	.3191	1.6709
	Myanmar	3.05750*	.19816	.000	2.3816	3.7334
	Singapura	.43500	.19816	.481	-.2409	1.1109
	Thailand	3.67500*	.19816	.000	2.9991	4.3509
Vietnam	2.45000*	.19816	.000	1.7741	3.1259	

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Dalam tabel 12 menunjukkan hasil uji *Tukey HSD* variabel tingkat pengangguran yang menunjukkan bahwa di antara 9 negara ASEAN, tingkat pengangguran di Indonesia secara statistik memiliki perbedaan yang signifikan dengan tingkat pengangguran di 8 negara ASEAN, yakni Brunei Darussalam dengan nilai signifikansi sebesar .000, Filipina sebesar .000, Kamboja sebesar .000, Laos sebesar .000, Malaysia sebesar .001, Myanmar sebesar .000, Thailand sebesar .000, dan Vietnam sebesar .000. Hasil dalam tabel tersebut memiliki pola perbedaan yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia lebih rendah dari Brunei Darussalam, namun lebih tinggi dari Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi makro ekonomi ditinjau melalui empat indikator, yakni pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita (PPP), tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran di Indonesia dan 9 negara ASEAN memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik.

Kondisi makro ekonomi Indonesia dilihat dari keempat indikator dapat digolongkan sedang dalam keadaan baik. Kinerja pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang cenderung meningkat mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional sehingga meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. Didukung dengan tingkat inflasi yang lebih rendah dalam tiga tahun terakhir mencerminkan kondisi ekonomi nasional yang relatif terkendali sehingga mampu menghantarkan ekonomi Indonesia ke arah yang maju. Berbeda dengan ketiga indikator tersebut, tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan besarnya kapasitas ekonomi yang masih terbuang, namun persentasenya yang cenderung menurun mencerminkan kapasitas ekonomi yang sudah semakin dimanfaatkan.

Jika dibandingkan dengan sesama golongan negara berpenghasilan menengah (*middle-income country*), ekonomi Indonesia memiliki kinerja yang tergolong baik pada indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang terus meningkat meskipun stagnan. Berbeda dengan kedua indikator tersebut, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia dapat dikata masih memiliki kinerja yang kalah dari negara-negara berkembang lainnya, di mana persentase tingkat inflasi di Indonesia tergolong masih sangat tinggi, bahkan tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun merupakan yang tertinggi di antara negara-negara berkembang di kawasan ASEAN.

Jika dilihat kedalam golongan negara berpenghasilan tinggi (*high-income country*), ekonomi Indonesia memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat, namun tingkat kemakmuran yang dicerminkan melalui pendapatan per kapita masih sangat berbeda signifikan, begitu pula dengan tingkat inflasi yang masih tergolong tinggi. Berbeda halnya dengan ketiga indikator tersebut, tingkat pengangguran di Indonesia lebih rendah secara signifikan dibanding Brunei Darussalam, namun lebih tinggi dibanding Singapura tetapi tidak berbeda signifikan.

Saran

Kondisi ekonomi Indonesia ditinjau dari keempat indikator dapat digolongkan sedang dalam keadaan baik. Meskipun tingkat inflasi dan tingkat pengangguran masih tinggi, kinerja pertumbuhan ekonomi dan PDB per kapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan kondisi ekonomi yang konsisten bertumbuh dengan didukung oleh tingkat inflasi yang cenderung menurun. Dengan demikian diharapkan bagi pemerintah agar dapat mempertahankan/meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi dan PDB per kapita, dan terus menekan tingkat inflasi agar semakin terkendali. Walaupun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan, dan tingkat inflasi dan pengangguran yang masih tergolong tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, sehingga diperlukan upaya pemerintah melalui berbagai terobosan kebijakan ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan tingkat inflasi dan pengangguran di Indonesia. Strategi kebijakan ekonomi berupa upaya meningkatkan arus investasi, mengoptimalkan kinerja ekspor, stabilisasi harga-harga, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dapat menjadi kunci keberhasilan pemerintah. Dengan menjalankan kebijakan ekonomi secara konsisten dan berhati-hati, diharapkan hal itu dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangkit dan maju

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Adapun kinerja pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang terus meningkat, dan tingkat inflasi yang semakin terkendali dapat menjadi tolak ukur utama untuk melakukan investasi di Indonesia. Didukung dengan strategi kebijakan pemerintah berupa kemudahan perizinan investasi penanaman modal dan penjaminan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi dapat menjadi alasan yang mendukung keamanan investasi di Indonesia sehingga minim dari resiko ekonomi dan resiko politik.

Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi peneliti selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) indikator makro ekonomi di antara banyaknya tolak ukur yang dapat digunakan, di antaranya indeks harga konsumen, tingkat partisipasi angkatan kerja, neraca perdagangan, neraca pembayaran, indeks penjualan ritel, ekspor neto, suku bunga, kurs valuta asing, pengeluaran konsumsi pribadi, dan lain sebagainya. Kedua, jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya 4 (empat) tahun dalam masa pemerintahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (2015-2018) dan akan lebih baik jika jangka waktu yang digunakan dapat diperpanjang/ditambah sehingga hasilnya dapat memberikan kesimpulan yang lebih luas. Ketiga, penelitian ini hanya mencakup ekonomi negara-negara kawasan regional sebagai pembanding. Ada kelebihan juga jika kinerja ekonomi Indonesia dinilai melalui analisis komparasi dengan negara-negara berkembang dalam deretan 20 (dua puluh) ekonomi terbesar dunia (*The group of Twenty/ G-20*) agar dapat dilihat bukan hanya dari cakupan regional, tetapi juga internasional.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., Laibson, D., & List, J. A. (2015). *Makroekonomi*. (D. B. Putera, Trans.) Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Asian Development Bank. (2016). *Asian Development Outlook 2016: Asia's Potential Growth*. Manila: Asian Development Bank.
- Asian Development Bank. (2017). *Asian Development Outlook 2017: Transcending The Middle-Income Challenge*. Manila: Asian Development Bank.
- Asian Development Bank. (2018). *Asian Development Outlook 2018: How Technology Affects Jobs*. Manila: Asian Development Bank.
- Asian Development Bank. (2019). *Asian Development Outlook 2019: Strengthening Disaster Resilience*. Manila: Asian Development Bank.
- Asian Development Bank. (2019). *Key Indicators for Asia and the Pacific*. Retrieved from Asian Development Bank: <https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2019>
- Astuti, R., Lapian, J., & Rate, P. V. (2016). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2016. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 399-406.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Laporan Perekonomian Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Laporan Perekonomian Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Konsep Ketenagakerjaan*. Retrieved Oktober 5, 2019, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Laporan Perekonomian Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Citradi, T. W. (2019). *Pak Jokowi, Ini Penyebab Investor Pilih Vietnam Dibanding RI*. Retrieved Desember 19, 2019, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190905105249-4-97273/pak-jokowi-ini-penyebab-investor-pilih-vietnam-dibanding-ri/5>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2013). *Business Research Methods* (12th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Daud, A. (2019). *Menakar Rapor Kinerja Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK*. Retrieved November 23, 2019, from Katadata: <https://katadata.co.id/telaah/2018/10/26/catatan-rapor-biru-dan-merah-4-tahun-pemerintahan-jokowi-jk>
- Deutsche Welle. (2019). *Selain Indonesia, Ekonomi 3 Negara ASEAN Lesu Akibat Perang Dagang*. Retrieved November 17, 2019, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/global/read/4040417/selain-indonesia-ekonomi-3-negara-asean-lesu-akibat-perang-dagang>
- Falianty, T. A. (2019). *Teori Ekonomi Makro dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gumelar, G. (2016). *BPS: Laju Ekonomi 2015 Banyak Terganjil Faktor Eksternal*. Retrieved Juli 4, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160205135559-78-109139/bps-laju-ekonomi-2015-banyak-terganjal-faktor-eksternal>
- Gumilang, R. C., Hidayat, R. R., & Endang, M. G. (2014). Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, Harga Emas dan Harga Minyak Dunia Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 14(2), 1-9.
- Hardana, H. A. (2015). Korelasi Antara Inflasi dan Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 69-82.
- Harianto, D., & Adi, P. H. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 4-17.
- Hismendi, Hamzah, A., & Musnadi, S. (2013). Analisis Pengaruh Nilai Tukar, SBI, Inflasi, dan Pertumbuhan PDB Terhadap Pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 16-28.
- Indriyani, S. N. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005-2015. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 4(2), 1-11.
- International Labour Organization. (2019). *Free and open access to labour statistics*. Retrieved Januari 20, 2020, from ILOstat: <https://ilostat.ilo.org/data/>
- International Labour Organization. (2019). *ILO Modelled Estimates: Methodological Overview*. Retrieved November 19, 2019, from ILO.org: <https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/TEM.pdf>

- Kantor Staf Presiden RI. (2015). *Meningkatkan Daya Saing Nasional Melalui Pembangunan Infrastruktur*. Retrieved November 3, 2019, from Kantor Staf Presiden Republik Indonesia: <http://ksp.go.id/meningkatkan-daya-saing-nasional-melalui-pembangunan-infrastruktur/>
- Kasiram, M. (2008). *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Pers.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2019). *Menaker Hanif: Target Penciptaan 10 Juta Lapangan Kerja Baru Terlampaui*. Retrieved Juli 2, 2020, from Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia: <http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/menaker-hanif-target-penciptaan-10-jutalapangan-kerja-baru-terlampaui->
- Kementerian PPN RI. (2015). *BAPPENAS-KSP Pastikan Nawacita Jadi Acuan RPJMN dan RKP*. Retrieved November 12, 2019, from Kantor Staf Presiden: <http://ksp.go.id/bappenas-ksp-pastikan-nawacita-jadi-acuan-rpjmndan-rkp/index.html>
- Kementerian PPN RI. (2015). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Retrieved Maret 20, 2020, from Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan: <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjmndan-rkp-2015-2019/>
- Kuncoro, M. (2015). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Kurniawan, P., & Budhi, M. K. (2015). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Larasati, I. S., & Sulasmiyati, S. (2018). Pengaruh Inflasi, Ekspor, dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Bruto. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 63(1), 8-16.
- Makki, S. (2019). *Ekonomi RI Tertahan Konsumsi dan Gejolak Ekonomi Global*. Retrieved November 18, 2019, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190806153048-532-418910/ekonomi-ri-tertahan-konsumsi-dan-gejolak-ekonomi-global>
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi* (6th ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of Economics* (7th ed.). Stamford: Cengage Learning.
- A., & Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1), 44-55.
- Masniadi, R. (2012). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tabungan, Dan Investasi Terhadap Tingkat Pendapatan Per Kapita Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 70- 89.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1), 127-138.
- Murni, A. (2019). *Ekonomika Makro Edisi Revisi* (5th ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Nurhayani. (2012). Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Pendapatan per kapita di Kabupaten Batanghari. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(5), 8-14.
- Pracoyo, T. K., & Pracoyo, A. (2005). *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pristyadi, B., & Sukaris. (2019). *Teori Ekonomi*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka. Reksoprayitno,

- S. (2017). *Pengantar Ekonomi Makro* (6th ed.). Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1994). *Makroekonomi* (14th ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Santosa, A. B. (2017). Analisis Inflasi di Indonesia. *SENDI_U3*, 445-452.
- Sembiring, L. J. (2019). *Daya Saing RI Anjlok, Ini Penjelasan Sri Mulyani dan Darmin*.
- Retrieved Desember 7, 2019, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191014073626-17-106664/daya-saing-ri-anjlok-ini-penjelasan-sri-mulyani-dan-darmin>
- Sitinjak, N. D. (2016). Dampak Inflasi, Pertumbuhan Jumlah Pekerja, dan Pertumbuhan PDB per kapita Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Eksis*, 11(2), 13-22.
- Soesastro, H. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sudarsana, N. A., & Candraningrat, I. R. (2014). Pengaruh Suku Bunga SBI, Nilai Tukar, Inflasi dan Indeks Dow Jones Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal FEB Universitas Udayana*, 4(4), 3291-3308.
- Sudiyatno, B., & Nuswandhari, C. (2009). Peran Beberapa Indiktor Ekonomi Dalam Mempengaruhi Risiko Sistematis Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 1(2), 66-81.
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, W. (2019). *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarsono, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto, A. B., & Rachmawati, L. (2013). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 22-34.
- Sutawijaya, A., & Zulfahmi. (2010). Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 6(1), 14-27.
- Wedhaswary, I. D. (2014). "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. Retrieved Oktober 3, 2019, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>.
- Widiasworo, E. (2019). *Menyusun Penelitian Kuantitatif Untuk Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Araksa Publisher.
- World Bank. (2019). *World Bank Country and Lending Groups*. Retrieved April 20, 2020, from The World Bank: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>.
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*, 8(3), 177-182.
- Yuniar, A. (2019). *Menko Darmin Ungkap Penyebab Turunnya Peringkat Daya Saing Indonesia*. Retrieved Desember 2, 2019, from Liputan 6:

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4082993/menko-darmin-ungkap-penyebab-turunnya-peringkat-daya-saing-indonesia>.

Yuniar, R. W. (2019). *Tantangan ekonomi Jokowi 2019-2024: Dari investor hengkang, daya saing 'lemah', hingga utang yang membengkak*. Retrieved Desember 28, 2019, from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50097558>.